



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS**

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110 Tlp.(021) 27513546

MINUTES OF MEETING

KICK OFF MEETING

INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN FOR LAKE TOBA

Tanggal : 23 Juli 2018
Tempat : Hotel Grand Aston, Medan
Peserta :

- **Pemerintah Daerah:**
 - Bappeda Propinsi Sumatera Utara
 - Dinas Pendidikan, Budaya, dan Pariwisata Sumatera Utara
 - Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Utara
 - Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara
 - Dinas Perhubungan Sumatera Utara
 - Bappeda Kabupaten Samosir
 - Bappeda Kabupaten Toba Samosir
 - Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara
 - Bappeda Kabupaten Karo
 - Bappeda Kabupaten Simalungun
 - Bappeda Kabupaten Pakpak Barat
 - Bappeda Kabupaten Dairi
- **Pemerintah:**
 - Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
 - Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata
 - Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR
 - Direktorat Bina Penataan Bangunan, Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Pengembangan Kawasan Permukiman, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen CK, Kementerian PUPR
 - Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR.
 - Pusat Perencanaan Infrastruktur, BPIW, Kementerian PUPR.
 - Balai Wilayah Sungai II Sumatera, Ditjen SDA, Kementerian PUPR
- **Badan Pengelola Otorita Danau Toba**
- **The World Bank Team**
- **Institut Teknologi Del**
- **Tim Konsultan Penyusun ITMP Lake Toba**

A. PEMBUKAAN DAN ARAHAN

Ir. Kuswardono, MCP

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW

1. *Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Lake* adalah sebuah upaya untuk mendukung pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba melalui pendekatan terpadu dan komprehensif untuk semua aspek dan sektor dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat (K/L), tingkat daerah maupun lintas pelaku di tingkat masyarakat, swasta dan badan pengelola terkait. Konsekuensi dari dilakukannya penanganan ini adalah dibutuhkan pendekatan penanganan secara Kolaboratif antar pemangku kepentingan di lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk kelembagaan penanganan berupa Kelompok Kerja (Pokja).
2. Kolaborasi pusat – daerah dan antar pemangku kepentingan akan digunakan sebagai *platform* bersama dalam penyusunan sebuah perencanaan, pelaksanaan program dan pengendaliannya.

3. Keberadaan beberapa dokumen perencanaan spasial dan dokumen perencanaan pembangunan yang telah dan sedang disusun untuk pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba membutuhkan internalisasi, sinkronisasi dan sinergisasi guna menghasilkan perencanaan yang terpadu dan komplementari. Seluruh dokumen yang ada seharusnya menjadi satu kesatuan perencanaan yang sinergis melalui ITMP Lake Toba yang akan disusun.
4. Dalam mendukung pengembangan KSPN Danau Toba perlu melakukan penekanan peningkatan muatan lokal dan nilai tambah dalam rangka menguatkan struktur industri pariwisata (Pengembangan Industri Pariwisata lebih dari sekedar pengembangan bisnis).

B. SESI PRESENTASI OLEH NARASUMBER

- 1. Narasumber : Bapak I Dewa Gde Sugihamretha**
Instansi : Jabatan Fungsional Perencana Utama, Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas

Materi yang disampaikan :

- a. Tema RKP tahun 2019 berbunyi Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan 5 (lima) prioritas nasional yaitu:
 - 1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
 - 2) Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
 - 3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya
 - 4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
 - 5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
- b. Poin 3 prioritas nasional terkait dengan kegiatan pariwisata dilakukan melalui kebijakan percepatan pengembangan 10 kawasan pariwisata termasuk 4 KEK pariwisata, dan penguatan destinasi unggulan, penguatan struktur ekonomi kreatif, pengembangan kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB), peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri, dan perluasan akses keuangan/pembiayaan.
- c. Target 20 juta wisatawan pada tahun 2019 (market share Indonesia di internasional masih kecil) dan beberapa kondisi potensi yang perlu menjadi pertimbangan dalam penanganan pembangunan termasuk pengembangan pariwisata adalah kondisi aging population dan potensi generasi milenials
- d. Beberapa gambaran terkait aktivitas wisatawan mancanegara di Indonesia antara lain:
 - 1) Jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia (2017) adalah sebanyak 14 juta orang.
 - 2) Share wisman yang berkunjung ke Indonesia (inbound) terhadap total kunjungan wisatawan dunia baru mencapai +1,0 persen, Asia Pasifik +4,3 persen, dan ASEAN +11,6 persen.
 - 3) Wisman masuk ke Indonesia melalui 19 pintu utama : Ngurah Rai (40%), Soekarno-Hatta (18%), dan Batam (11%). Bandara Adi Sucipto hanya menerima kunjungan sebanyak 142 ribu wisman (1%)
 - 4) Berdasarkan kewarganegaraan, Tiongkok, Malaysia dan Singapura adalah 3 kontributor wisman terbesar di 2017; sedangkan dari luar Asia terdapat, Australia (urutan ke-4), Inggris (ke-8), dan Amerika Serikat (ke-9).
- e. Beberapa catatan baik dari kondisi wisatawan mancanegara di Indonesia yaitu telah meningkatnya jumlah kedatangan wisatawan asing dan rerata lama tinggal.
- f. Dukungan kebijakan pariwisata yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan inovasi produk pariwisata meliputi atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi agar wisatawan mancanegara tertarik untuk menggunakan produk tersebut sehingga aktivitas jual-beli di industri pariwisata meningkat.
- g. Berdasarkan arahan presiden pada tanggal 6 November 2015 terdapat 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yaitu Danau Toba, Tanjung kelayang (KEK), Tanjung Lesung (KEK), Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota Tua, Borobudur dan sekitarnya, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika (KEK), Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai (KEK).

- h. Informasi terbaru berdasarkan arahan presiden pada bulan November tahun 2017 bahwa dari 10 DPP terdapat 4 DPP paling prioritas yaitu DPP Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika, dan Labuan Bajo.

2. Narasumber : Bapak Gatot Subyargo Wijayadi
Instansi : Kasubdit Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya, Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Materi yang disampaikan :

- a. Dibutuhkan kesiapan rencana tata ruang baik itu RTRW maupun RDTR untuk mendukung penawaran investasi (asing dan lokal) dalam rangka mendorong industri pariwisata (tidak sekedar bisnis pariwisata).
- b. Bentuk investasi yang potensial untuk dikembangkan saat ini adalah di bidang infrastruktur dan usaha/bisnis kreatif.
- c. Permasalahan perijinan masih menjadi kendala yang harus mendapatkan perhatian untuk dilakukan efisiensi. Kemudahan perijinan menuntut pemerintah daerah diharapkan dapat memproses syarat perijinan dalam waktu cepat 10 -12 hari sehingga dapat menarik para investor untuk memulai dukungannya terhadap kegiatan pariwisata.
- d. Saat ini rencana infrastruktur di Propinsi Sumatra Utara belum memberikan perhatian dan porsi yang besar bagi kebutuhan pengembangan pariwisata.
- e. Rencana KSPN dan Perda RTRW yang telah ada saat ini belum optimal dalam mendukung kebutuhan ijin investasi. Karenanya dibutuhkan penguatan substansi dalam kedua hal tersebut.

3. Narasumber : Ibu Evi Hermirasari
Instansi : The World Bank

Materi yang disampaikan :

- a. *Indonesia Tourism Development Program (ITDP)* mencakup:
 - 1) Pengembangan Kelembagaan
 - 2) Infrastruktur
 - 3) Pembangunan kapasitas masyarakat (partisipatif)
 - 4) Kemudahan investasi swasta
- b. Proses pelaksanaan pengembangan pariwisata di Indonesia, khususnya di Danau Toba akan menggunakan dokumen *ITMP Lake Toba* sebagai *guidelines* oleh *stakeholder* pusat (Kementerian Lembaga) dan daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- c. Penyusunan *ITMP Lake Toba* diharapkan dapat melingkupi kebijakan terkait pengembangan kelembagaan, perencanaan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia di sektor pariwisata, dan memberikan kemudahan sektor private untuk melakukan investasi.
- d. Diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat (K/L), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, komunitas, swasta, dan lembaga terkait (perguruan tinggi, para ahli, LSM, dll) dalam proses penyusunan dokumen *ITMP Lake Toba*.
- e. Keterlibatan para pihak terkait secara langsung di lapangan menjadi salah satu syarat untuk tersusunnya dokumen *ITMP Lake Toba* yang relevan, up to date, dan aplikatif dalam menciptakan rencana pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
- f. Dibutuhkan produk rencana untuk 20 tahun dan 5 tahun yang lebih detail (untuk segera diimplementasikan). Hal ini menjadi persyaratan kondisi yang harus dipenuhi agar dapat mengoptimalkan pendanaan yang sangat besar yang telah disiapkan sebagai bentuk perhatian yang besar dari pemerintah Indonesia bagi pengembangan kepariwisataan di Danau Toba

- g. Berdasarkan SK Bappenas tanggal 7 Juni 2018 terkait Tim Koordinasi Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan terdapat keterangan bahwa Tim Pengarah berada pada tingkat Menteri dan Tim Pelaksana berada pada tingkat eselon 1, dan Tim teknis pada tingkat eselon 2. Terdapat 4 (empat) bidang pokja yang sesuai dengan fokus masing-masing komponen ITMP.
- h. Pada tingkat daerah terdapat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diharapkan terdapat pokja yang membidangi bidang kepariwisataan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh anggota pokja daerah tersebut.
- i. Tambahkan informasi dari *World Bank* terkait *Water Quality of Lake Toba* oleh Achua Fang Lim yaitu:
 - 1) Saat ini sedang berlangsung upaya kerjasama antara World Bank dan Kemenkomaritim dalam bentuk *workshop* pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
 - 2) World Bank telah melakukan penyusunan kajian terkait kualitas air Danau Toba yang telah memiliki final report. Final report tersebut dapat digunakan sebagai referensi oleh Tim Konsultan Penyusun ITMP Lake Toba sebagai bahan referensi.
 - 3) Danau Toba saat ini telah menunjukkan degradasi kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya insiden ikan mati yang disebabkan oleh kondusi korofil (alga) yang tinggi.
 - 4) Berdasarkan kondisi tersebut, diharapkan ITMP Lake Toba dapat memuat konsep *integrated water management system* agar pengembangan pariwisata di Danau Toba dapat berkelanjutan.

4. Narasumber : Ibu Nova Arisne
Instansi : Kepala Bidang Perencanaan Strategis, Asisten Deputi Manajemen Strategis, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata.

Materi yang disampaikan :

- a. Pariwisata dianggap punya keunggulan mengingat mayoritas berada di sektor jasa. Selain itu, pariwisata merupakan komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level paling bawah masyarakat. Setiap tahun performa pariwisata Indonesia terus menanjak. Grafiknya sangat kontras bila dibandingkan komoditas lain, seperti minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit yang terus merosot.
- b. Sektor pariwisata diprediksikan menjadi devisa nomor 1 pada tahun 2019 dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 20 juta orang.
- c. Mengutip ucapan Bapak Gubernur Bank Indonesia bahwa pariwisata adalah pilihan tepat untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Karena pariwisata mampu meningkatkan cadangan devisa negara yang tergerus sejak Februari lalu. Hal ini dikarenakan terus digunakannya cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
- d. Pertumbuhan wisatawan di Indonesia memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu sekitar 22%, dibandingkan dengan pertumbuhan turis di ASEAN sebesar 7% dan dunia sebesar 6,4%.
- e. Terhitung bulan Januari-Desember 2017, dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, Indonesia berada di posisi kedua teratas dengan pertumbuhan wisatawan sebesar 22%, vietnam sebesar 29%, Thailand sebesar 8,7%, Singapura 5,8%, sedangkan Malaysia mengalami penurunan sebesar 4,0%.
- f. Keunggulan Wonderful Indonesia di negara-negara Asia berdasarkan World Economic Forum (WEF) 2017 diketahui bahwa *Brand Strategy Rating* Indonesia berada di peringkat 47 mengalahkan Thailand (68) dan Malaysia (85). Strategi branding Wonderful Indonesia dalam tahap penetrasi online memiliki keunggulan dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia namun masih kalah dengan Singapura.

- g. *Brand Strategy Rating* dinilai dengan mempertimbangkan:
 - 1) Indikator dari NTO yang fokus pada *digital demand* (D2)
 - 2) Positioning strategy dan promosi pariwisata yang berhubungan dengan brandtags
 - 3) jumlah total pencarian online dari wisatawan mancanegara
- h. TTCI Indonesia berdasarkan hasil *World Economic Forum* (WEF) terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2008 hingga 2017. Apabila dihubungkan dengan competitiveness index, Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2008 hingga 2017 dengan peringkat masing-masing 80, 81, 74, 70, 50, dan pada tahun 2017 pada peringkat 42.
- i. Kebijakan arah pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan:
 - 1) Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - 2) Orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - 3) Tata kelola yang baik;
 - 4) Terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - 5) Mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
- j. Strategi pengembangan pemasaran pariwisata Indonesia meliputi:
 - 1) *Marketing strategy* yaitu *destination, origin, dan timeline*
 - 2) *Promotion strategy* yaitu *branding, advertising, dan selling*
 - 3) *Media strategy* yaitu *paid, owned, social, dan endorser media*
 - 4) *Promotion time strategy* yaitu *pre event, on event, dan post event*
- k. Upaya pengembangan industri dan kelembagaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui sertifikasi kompetensi dan pelatihan dasar kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan sadar wisata di destinasi wisata dan sekitarnya, dan pengembangan industri kreatif pariwisata melalui sertifikasi usaha pariwisata di 13 bidang usaha pariwisata.
- l. Pengembangan Danau Toba saat ini merupakan prioritas nasional
- m. Guna mendukung pengembangan kepariwisataan di Danau Toba dan mengoptimalkan potensi yang ada, Badan Otorita Pengelola Danau Toba (BOPDT) menjadi salah satu pihak yang terlibat aktif dalam pengembangannya.
- n. Sebagai suatu acuan, Ranking Indeks Daya Saing (berdasarkan *Travel and Tourism Competitiveness Report* dari WEF) menunjukkan peringkat yang meningkat, akan tetapi secara lebih rinci, indeks yang terkait dengan pariwisata (khususnya *environment sustainability*) masih jauh berada di peringkat bawah selama beberapa tahun terakhir. Kementerian Pariwisata akan berusaha untuk menaikkan peringkat tersebut, dengan berfokus pada beberapa subindex dari *environment sustainability*.
- o. Tambahkan informasi dari Bapak Indra, Asdep Pengembangan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata terkait Kebijakan Pariwisata Indonesia yaitu:
 - 1) Kebijakan pariwisata yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada wisatawan mancanegara berupa kebebasan visa kunjungan Indonesia (*sustainable for foreigner*)
 - 2) Berdasarkan hasil *World Economic Forum* (WEF) 2017 indeks kompetitif pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Competitiveness Index) jika dibandingkan di negara ASEAN terdapat 3 (tiga) peringkat aspek terbaik yaitu kemudahan bagi wisatawan mancanegara, harga yang terjangkau, dan destinasi cagar alam. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) peringkat aspek terburuk yaitu kesehatan dan kebersihan, kelestarian alam yang kurang terjaga, dan media informasi bagi wisatawan mancanegara.

- 3) Isu lingkungan dalam pariwisata Indonesia perlu menjadi perhatian mengingat Indonesia memiliki *environment sustainability* yang buruk terutama dalam kualitas air, ancaman kepunahan flora dan fauna, dan alih fungsi hutan.
- 4) Pengembangan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism for Development*) diwujudkan dalam 3 (tiga) konsep yaitu *Sustainable Tourism Destination* (ekonomi, masyarakat, dan lingkungan), *Sustainable Tourism Observatory* (rekomendasi, pelaporan, riset dan pengawasan), dan *Sustainable Tourism Certification* (asistensi, akreditasi, dan sertifikasi)
- 5) Pembangunan pariwisata sebaiknya turut serta meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan dampak pengembangan pariwisata yang ada. Paradigm pariwisata yaitu bagaimana menciptakan sebuah keadaan dimana wisatawan dan penduduk lokal dapat menikmati aktivitas pariwisata tersebut secara bersamaan.

5. Narasumber : Ika Hardina Lubis, SE, MSE, MA.
Instansi : Kasubbid Ekonomi, Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman, dan SDA, Bappeda Sumatera Utara

Materi yang disampaikan :

- a. Pariwisata merupakan sektor yang masih rendah kontribusinya terhadap PDRB daerah, yang saat ini masih didominasi Pertanian dan Perkebunan.
- b. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara telah memiliki Ripparda dengan 12 DPP dan 75 KSPP. Untuk mendukung operasionalisasi dari Ripparda tersebut dibutuhkan regulasi dengan kekuatan peraturan setingkat Pergub sebagai tindak lanjut dari Perda-nya
- c. Angka pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Utara memiliki kecenderungan menurun, tetapi angka-angka penilaian yang lain cenderung naik.
- d. Ketika sektor pertanian dan perkebunan turun, pariwisata diarahkan menjadi sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi pengembangan wilayah, tanpa mengabaikan kepentingan sektor yang bersangkutan
- e. Beberapa program terkait pariwisata telah direncanakan dan dilakukan, terutama di Danau Toba, salah satunya peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan UMKM. Program pembangunan tersebut sudah disinergikan dengan OPD daerah terkait serta pemerintah pusat.

C. SESI DISKUSI:

1. Bapak Kuswardono, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis:

- a. Proses pelaksanaan penyusunan ITMP *Lake Toba* diharapkan memiliki versi 2 (dua) bahasa yaitu versi bahasa dan english.
- b. Proses penyusunan rencana yang termuat dalam ITMP *Lake Toba* harus transparan dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah sehingga apabila dibutuhkan pokja daerah dapat didukung langsung.
- c. Keberadaan *head office* yang berada di lapangan sebaiknya memiliki kemampuan Bahasa Indonesia dan keahlian komunikasi yang baik agar dapat menggali informasi secara langsung di lapangan.
- d. Diharapkan kepada Tim Konsultan untuk segera menyusun milestone kegiatan penyusunan ITMP *Lake Toba* dengan target waktu dan kedalaman substansi yang cukup detail dalam waktu satu minggu.

2. Ibu Evi, The World Bank Team:

- a. Seiring dengan berlangsungnya penyusunan ITMP di 3 destinasi wisata prioritas, secara parallel sedang dilaksanakan penyusunan Pedoman Umum (Pedum) program yang berisi tata cara pelaksanaan program dan akan digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

3. Bapak Antoni, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

- a. Hingga tahun 2018 ini dari 8 kabupaten yang termasuk dalam delineasi ITMP Lake Toba baru terdapat 3 yang telah memiliki RTRW. Diperlukan keterangan terkait payung hukum ITMP Lake Toba karena akan digunakan sebagai *guidelines* dari kabupaten/kota
- b. Kawasan Danau Toba telah memiliki dokumen perencanaan. Sebaiknya proses perencanaan segera dilaksanakan sehingga dapat dilakukan kegiatan fisik.
- c. Peran pokja daerah dalam proses pengembangan pariwisata Danau Toba belum pernah disosialisasikan. Apabila telah memasuki fase pembangunan, diharapkan terdapat sosialisasi terkait peran pokja daerah.

4. Bapak Arie, Direktur Badan Pengelola Otorita Danau Toba:

- a. Proses penyusunan ITMP Lake Toba diharapkan dapat selesai sesuai rencana pelaksanaan yang ditetapkan yaitu pada bulan Juli 2019.
- b. Pemerintah Daerah menunggu arahan untuk menyiapkan program 2019 agar sudah mulai terkait, terintegrasi dan sinergis dengan output ITDP.
- c. Dalam mendukung implementasi pengembangan KSPN Danau Toba, BODT menunggu hasil dari ITMP untuk mewujudkan program-program yang nyata dan sinergis.
- d. Tim konsultan diharapkan mulai menjalin komunikasi dan kepercayaan dengan pemerintah daerah dan unsur-unsur pendukung lainnya. Hal tersebut menjadi penting mengingat kawasan Danau Toba memiliki karakteristik fisik dan sosial yang unik.
- e. Pada kegiatan seminar selanjutnya diharapkan terdapat penjelasan terkait gambaran umum ITMP Lake Toba yang akan disusun. Terutama terkait metode yang digunakan dan kedalaman substansinya.
- f. Kawasan Danau Toba seharusnya memiliki buku putih setelah 6 bulan berdirinya Badan Pengelola Otorita Danau Toba. Namun hingga saat ini (18 bulan kemudian) belum terdapat buku putih tersebut. Harapannya keberadaan ITMP Lake Toba dapat digunakan sebagai buku putih Badan Pengelola Otorita Danau Toba dalam melakukan pengembangan kawasan Danau Toba.

5. Bapak Hari, Kepala Seksi Program, BWS II Sumatera Utara

- a. Pengembangan kawasan di Danau Toba tidak terlepas dari perizinan penetapan wewenang sempadan-empadan danau yang ada. Perlu adanya izin dari pemerintah kabupaten dalam mengembangkan kawasan sempadan Danau Toba sehingga dibutuhkan koordinasi dengan kabupaten kabupaten terkait pemanfaatannya.

6. Bapak Yosef, Insitute Teknologi Del, Laguboti Toba Samosir

- a. Kabupaten Samosir sudah mulai fokus ke sektor pariwisata, sedangkan Pemda kabupaten lain belum terlihat cukup besar memperhatikan dan fokus pada sektor pariwisata. Kondisi ini menjadi tantangan untuk dilakukannya kolaborasi dan kerjasama antar daerah. Kabupaten Samosir dalam hal ini menunggu masukan dari ITDP untuk pemutakhiran Rippardanya.
- b. Diskusi yang dilakukan sejauh ini belum membahas terkait kualitas air di Danau Toba. Sektor pariwisata yang direncanakan belum membahas tentang kualitas lingkungan secara detail. Fungsi Danau Toba sebagai daya dukung lingkungan perlu menjadi perhatian dalam proses penyusunan ITMP Lake Toba. Eksisting saat ini 700% fosfor yang berada di Danau Toba disebabkan oleh kegiatan aqua culture dalam bentuk keramba-keramba ikan. Perlu adanya remediasi, monitoring, dan konservasi kualitas air sehingga daya dukung air di Danau Toba dapat menjadi daya tarik pariwisata tersendiri.
- c. Permasalahan lingkungan juga harus menjadi fokus dalam pembangunan pariwisata, terutama polusi air akibat aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba. Dibutuhkan perhatian tentang keberadaan PT Aquafarm.

7. Bapak Rudi, Bappeda Simalungun

- a. Kabupaten Simalungun memiliki Perda RTRW Kabupaten yang telah mencakup kawasan Danau Toba. Upaya pengembangan Danau Toba terhambat oleh perizinan di garis sempadan sepanjang 70 km yang semuanya termasuk dalam kawasan hutan lindung.
- b. Kondisi saat ini Tigaras hanya dikembangkan sebagai pelabuhan saja. Kondisi tersebut berbeda dengan Parapat yang dapat dikembangkan menjadi camping ground dan kegiatan atraksi lainnya dengan catatan kawasan tersebut masuk dalam hutan lindung (HL). Perlu adanya kejelasan proses izin dan birokrasi di pemerintah (Pusat dan Daerah) sehingga semua potensi yang ada di kawasan Danau Toba dapat dioptimalkan.

D. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Ir. Kuswardono, MCP

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW

1. Dalam penyusunan ITMP *Lake Toba*, perlu berorientasi pada daya dukung lingkungan dan co-benefit (pengembangan ekonomi secara bersamaan dengan perlindungan dan penanganan lingkungan). Karenanya dibutuhkan suatu pembelajaran dari beberapa keberhasilan dan kegagalan pengembangan kepariwisataan yang telah dikembangkan di tingkat nasional yang berskala internasional seperti Bali.
2. Pengembangan kepariwisataan di Danau Toba diharuskan untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (*human resource development*) sebelum pembangunan fisik
3. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan ITMP *Lake Toba*, maka perlu disiapkan *milestones* (substansi dan *time frame*) yang menjadi acuan bersama dalam mewujudkan dokumen perencanaan yang *reliable*, layak dan dapat diimplementasikan. Milestone ini diharapkan dapat selesai paling lambat 1 (satu) minggu setelah kick-off meeting ITMP *Lake Toba* berlangsung yaitu pada tanggal 30 Juli 2018.